Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial
Volume 12 Number 7, Tahun, 2026
E-ISSN: 2988-1986
Open Access:



IMPLEMENTASI PROGRAM SITASKIN (SINERGI PERCEPATAN PENGENTASAN KEMISKINAN): STUDI KASUS DESA CANGKRING, KECAMATAN JENGGAWAH, KABUPATEN JEMBER

Fadila Handayani [1] , Baktiawan Nusanto[2]

[12] Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Muhammadiyah Jember, Jember, Indonesia

ARTICLE INFO

Article history:
Received November 2026
Revised November 2026
Accepted November 2026
Available November 2026

fadilahandayani22@gmail.com

This is an open access article under the CC BY-SA license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute

ABSTRACT

Aims: Menganalisis implementasi Program SITASKIN di Desa Cangkring, Kabupaten Jember. **Design/Methodology/Approach:** Penelitian kualitatif dengan desain studi kasus; pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi; informan dipilih secara purposive sampling. **Findings:** Implementasi berjalan cukup baik pada variabel disposisi, namun menghadapi hambatan pada komunikasi, sumber daya, dan koordinasi birokrasi. **Research Limitations/Implications:** Studi terbatas pada satu desa; temuan ini mendorong penguatan kapasitas pendamping dan mekanisme koordinasi lintas lembaga. **Originality/Value:** Penelitian pertama yang mengkaji Program SITASKIN Kabupaten Jember dari perspektif model implementasi Edwards III secara komprehensif di tingkat desa.

Abstract

***Aims**: To analyze the implementation of the SITASKIN Program in Cangkring Village, Jember Regency. **Design/Methodology/Approach**: A qualitative case study was employed; data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation using purposive sampling. **Findings**: Implementation was relatively effective in the disposition variable, yet faced challenges in communication, resources, and bureaucratic coordination. **Research Limitations/Implications**: Findings are limited to a single village and highlight the need to strengthen facilitator capacity and inter-institutional coordination mechanisms. **Originality/Value**: This is the first study comprehensively examining SITASKIN through the Edwards III implementation model at the village level.*

1. PENDAHULUAN

Kemiskinan di Indonesia hingga saat ini masih menjadi persoalan kompleks yang memerlukan pendekatan kebijakan yang komprehensif dan berkesinambungan. Data Badan Pusat Statistik (2023) mencatat bahwa angka kemiskinan di Indonesia mencapai 9,36% dari total penduduk, dengan konsentrasi tertinggi berada di kawasan perdesaan. Kabupaten Jember sebagai salah satu kabupaten dengan jumlah penduduk miskin yang signifikan di Provinsi Jawa Timur menanggung beban kemiskinan struktural yang belum sepenuhnya teratasi oleh program-program nasional yang ada. Kondisi ini menuntut adanya inovasi kebijakan di tingkat daerah yang lebih responsif terhadap karakteristik lokal masyarakat miskin.

Pemerintah Kabupaten Jember merespons tantangan ini melalui peluncuran Program SITASKIN (Sinergi Percepatan Pengentasan Kemiskinan) sebagai instrumen kebijakan lokal yang dirancang untuk menyinergikan berbagai sumber daya dan program pengentasan kemiskinan yang



ada di tingkat kabupaten hingga desa. Program ini mengintegrasikan bantuan sosial, pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses layanan dasar, dan penguatan kapasitas komunitas dalam satu kerangka kerja terpadu. Kehadiran SITASKIN mencerminkan semangat desentralisasi dalam pengelolaan program sosial sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Kajian-kajian terdahulu mengenai implementasi program pengentasan kemiskinan di Indonesia menunjukkan hasil yang beragam. Sebagian besar penelitian menyimpulkan bahwa keberhasilan program pengentasan kemiskinan sangat bergantung pada kualitas implementasi di lapangan, bukan semata-mata pada desain kebijakan di tingkat pusat. Penelitian Widodo dan Santoso (2021) menemukan bahwa program pemberdayaan yang bersifat top-down cenderung mengalami kegagalan adaptasi terhadap konteks sosial-budaya lokal, sementara pendekatan berbasis komunitas menunjukkan dampak yang lebih berkelanjutan. Di sisi lain, studi Pratiwi et al. (2022) mengidentifikasi bahwa fragmentasi kelembagaan dan lemahnya koordinasi antar-aktor menjadi hambatan utama dalam pelaksanaan program kemiskinan di tingkat desa.

Meskipun demikian, terdapat research gap yang cukup signifikan dalam literatur yang ada. Pertama, belum banyak penelitian yang secara spesifik mengkaji program kemiskinan inovatif berbasis sinergi lokal seperti SITASKIN dari perspektif implementasi kebijakan. Kedua, sebagian besar studi yang tersedia terfokus pada program-program nasional seperti PKH, BPNT, dan Program Keluarga Sejahtera, sementara program daerah yang memiliki karakteristik unik relatif kurang mendapat perhatian akademis. Ketiga, analisis implementasi kebijakan di tingkat desa sebagai unit pemerintahan paling dekat dengan masyarakat miskin masih minim, padahal efektivitas program justru ditentukan oleh dinamika yang terjadi pada level tersebut.

Berdasarkan gap penelitian tersebut, studi ini hadir untuk mengisi kekosongan akademis dengan mengkaji secara mendalam implementasi Program SITASKIN di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember. Desa Cangkring dipilih karena merupakan salah satu desa dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kecamatan Jenggawah sekaligus menjadi lokasi percontohan penerapan SITASKIN oleh Pemerintah Kabupaten Jember. Penelitian ini secara spesifik bertujuan untuk: mendeskripsikan pelaksanaan Program SITASKIN di Desa Cangkring, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi program, dan merumuskan rekomendasi untuk penguatan implementasi program di masa mendatang.

2. TINJAUAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI

Teori Implementasi Kebijakan

Implementasi kebijakan merupakan tahapan paling kritis dalam siklus kebijakan publik karena pada fase inilah suatu kebijakan diuji dalam realitas lapangan. George C. Edwards III (1980) melalui karyanya yang monumental mengajukan empat variabel utama yang menentukan keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu: komunikasi (communication), sumber daya (resources), disposisi (disposition), dan struktur birokrasi (bureaucratic structure). Keempat variabel ini bekerja secara simultan dan saling memengaruhi, sehingga kegagalan pada salah satu variabel dapat berdampak negatif pada keseluruhan proses implementasi.

Komunikasi dalam konteks implementasi mencakup kejelasan instruksi, konsistensi pesan, dan ketepatan penyampaian kepada para pelaksana di lapangan. Sumber daya meliputi ketersediaan staf, anggaran, fasilitas, dan informasi yang memadai. Disposisi merujuk pada sikap, komitmen, dan motivasi para implementor dalam menjalankan kebijakan. Sementara itu, struktur birokrasi mencakup standard operating procedures (SOP) dan fragmentasi kelembagaan yang dapat memperlancar atau menghambat implementasi. Model Edwards III dipilih dalam penelitian ini karena relevansinya untuk menganalisis implementasi program pemerintah dalam konteks birokrasi daerah di Indonesia.

Selain model Edwards III, penelitian ini juga mengadopsi perspektif pemberdayaan masyarakat (community empowerment) sebagai kerangka analisis komplementer. Ife dan Tesoriero (2016) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai proses peningkatan kapasitas individu dan kelompok untuk mengidentifikasi masalah, mengorganisir sumber daya, dan mengambil tindakan kolektif guna memperbaiki kondisi kehidupan mereka. Dalam konteks program pengentasan kemiskinan, pemberdayaan bukan sekadar distribusi bantuan material, melainkan proses transformasi sosial yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif pembangunan.

Penelitian Terdahulu

Studi Huda et al. (2023) yang mengkaji implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bondowoso menemukan bahwa rendahnya kualitas komunikasi antara pendamping PKH dengan penerima manfaat menyebabkan kesalahan pemahaman tentang hak dan kewajiban peserta program. Temuan ini menegaskan pentingnya variabel komunikasi dalam kerangka Edwards III sebagai faktor penentu keberhasilan program sosial di tingkat desa.

Penelitian Rahayu dan Kurniawan (2022) tentang implementasi program pemberdayaan ekonomi berbasis komunitas di Jawa Timur mengidentifikasi bahwa ketersediaan sumber daya manusia yang kompeten menjadi faktor pembeda antara desa yang berhasil dan gagal dalam mengimplementasikan program kemiskinan. Desa-desa dengan pendamping yang terlatih dan berpengalaman mampu mengoptimalkan alokasi bantuan hingga 40% lebih efisien dibandingkan desa tanpa pendamping yang memadai.

Mulyadi dan Setiawan (2021) dalam kajian mereka tentang program desa mandiri di Provinsi Jawa Timur menyimpulkan bahwa disposisi positif dari kepala desa dan perangkat desa merupakan prediktor kuat keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Kepemimpinan desa yang transformasional terbukti mampu memobilisasi partisipasi warga secara lebih efektif dan membangun kepercayaan terhadap program pemerintah.

Dari perspektif kelembagaan, Abidin dan Fauzi (2023) menemukan bahwa fragmentasi birokrasi antara dinas-dinas teknis di tingkat kabupaten dengan aparatur desa sering kali menjadi sumber inefisiensi dalam pelaksanaan program pengentasan kemiskinan. Tumpang tindih kewenangan dan ketiadaan mekanisme koordinasi yang jelas menyebabkan duplikasi program dan pemborosan anggaran.

Lebih jauh, studi komparatif Nugroho et al. (2022) yang membandingkan implementasi program kemiskinan di empat kabupaten di Jawa Timur menemukan bahwa kabupaten yang menerapkan pendekatan sinergi lintas sektor menunjukkan penurunan angka kemiskinan yang lebih cepat dibandingkan kabupaten yang mengandalkan program sektoral. Temuan ini

*Corresponding author
E-mail addresses: fadilahandayani22@gmail.com



mendukung relevansi Program SITASKIN yang mengusung pendekatan sinergi sebagai strategi utamanya.

Dalam konteks pemberdayaan perempuan dan keluarga miskin, Fitriani dan Susanto (2023) mengkaji dampak program bantuan sosial terpadu di pedesaan Jember dan menemukan bahwa intervensi yang menggabungkan bantuan tunai, pendampingan usaha, dan akses layanan kesehatan menghasilkan dampak yang lebih signifikan terhadap kesejahteraan keluarga dibandingkan intervensi tunggal. Penelitian ini relevan dengan desain SITASKIN yang bersifat multi-dimensi.

Penelitian Wahyudi (2022) tentang peran pemerintah desa dalam implementasi program sosial menunjukkan bahwa keberhasilan program di tingkat desa sangat dipengaruhi oleh kapasitas administrasi pemerintah desa dalam hal perencanaan, penganggaran, dan pelaporan. Desa-desa yang telah mendapatkan peningkatan kapasitas melalui pelatihan sistematis mampu mengelola program dengan akuntabilitas yang jauh lebih baik.

Terakhir, kajian Lestari dan Prabowo (2021) tentang partisipasi masyarakat dalam program pengentasan kemiskinan di perdesaan Jawa menggarisbawahi pentingnya keterlibatan warga dalam setiap tahapan program dari perencanaan hingga evaluasi sebagai prasyarat keberlanjutan dampak program. Partisipasi yang autentik, bukan sekadar mobilisasi formal, terbukti meningkatkan rasa kepemilikan (sense of ownership) dan komitmen masyarakat terhadap program.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus tunggal (single case study). Pilihan pendekatan kualitatif didasarkan pada pertimbangan bahwa penelitian ini bermaksud memahami implementasi Program SITASKIN secara mendalam dalam konteks sosial dan kelembagaan yang spesifik di Desa Cangkring. Sebagaimana dikemukakan oleh Creswell dan Poth (2018), pendekatan kualitatif sangat tepat digunakan ketika peneliti ingin mengeksplorasi makna pengalaman individu dan memahami fenomena dalam setting alamiahnya.

Lokasi penelitian adalah Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember, Provinsi Jawa Timur. Pemilihan lokasi dilakukan secara purposive dengan mempertimbangkan beberapa kriteria: (1) Desa Cangkring merupakan salah satu desa dengan tingkat kemiskinan tertinggi di Kecamatan Jenggawah berdasarkan data DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial) 2023, (2) desa ini telah mengimplementasikan Program SITASKIN sejak tahap awal peluncuran pada tahun 2022, dan (3) terdapat variasi yang kaya dalam karakteristik penerima manfaat yang memungkinkan analisis yang komprehensif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui tiga teknik pengumpulan data: pertama, wawancara mendalam (in-depth interview) dengan informan kunci; kedua, observasi partisipatif selama kegiatan program berlangsung; dan ketiga, dokumentasi terhadap dokumen-dokumen program. Informan penelitian dipilih menggunakan teknik purposive sampling dengan kriteria keterlibatan langsung dalam implementasi atau sebagai penerima manfaat Program SITASKIN. Informan meliputi: Kepala Desa

Cangkring, Sekretaris Desa, Ketua Tim Pelaksana SITASKIN tingkat desa, dua orang pendamping program dari Dinas Sosial Kabupaten Jember, dan delapan orang penerima manfaat yang dipilih secara bervariasi berdasarkan kategori kemiskinan.

Teknik pengumpulan data dilaksanakan selama empat bulan, yakni dari bulan September hingga Desember 2024. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur menggunakan panduan wawancara yang telah divalidasi. Setiap sesi wawancara berlangsung antara 45 hingga 90 menit dan direkam dengan persetujuan informan. Observasi dilakukan pada rapat koordinasi program, kegiatan pendistribusian bantuan, dan pertemuan kelompok penerima manfaat. Dokumentasi meliputi peraturan bupati tentang SITASKIN, laporan pelaksanaan program, data penerima manfaat, dan notulensi rapat koordinasi.

Analisis data menggunakan model analisis interaktif Miles, Huberman, dan Saldaña (2014) yang terdiri dari empat tahapan: kondensasi data (data condensation), penyajian data (data display), penarikan dan verifikasi kesimpulan (drawing and verifying conclusions). Tahap kondensasi data dilakukan dengan cara mentranskripsi rekaman wawancara, mengkode data berdasarkan kategori-kategori yang relevan dengan kerangka teori Edwards III, dan memilah informasi yang paling signifikan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif-analitis, matriks perbandingan, dan bagan alur implementasi.

Keabsahan data dijamin melalui triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan memverifikasi informasi yang diperoleh dari satu informan kepada informan lainnya. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan data hasil wawancara dengan data observasi dan dokumentasi. Selain itu, member checking dilakukan dengan mengkonfirmasikan temuan penelitian kepada informan kunci untuk memastikan akurasi interpretasi peneliti.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum Program SITASKIN di Desa Cangkring

Program SITASKIN di Kabupaten Jember diluncurkan berdasarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Terpadu. Program ini dirancang untuk mengintegrasikan setidaknya delapan sumber program bantuan sosial yang sebelumnya berjalan secara terpisah, meliputi bantuan pangan non-tunai, Program Keluarga Harapan, bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni, subsidi air bersih, beasiswa pendidikan, bantuan usaha ekonomi produktif, jaminan kesehatan, dan pelatihan keterampilan. Di Desa Cangkring, program ini menjangkau 247 keluarga penerima manfaat (KPM) dari total 1.893 jiwa penduduk desa, atau sekitar 13,05% dari total populasi.

Secara kelembagaan, implementasi SITASKIN di Desa Cangkring melibatkan tiga lapisan aktor: (1) Tim Koordinasi Kabupaten yang dipimpin oleh Dinas Sosial Kabupaten Jember, (2) Tim Pelaksana Kecamatan yang dikoordinasikan oleh Camat Jenggawah, dan (3) Tim Pelaksana Desa yang diketuai oleh Kepala Desa Cangkring dengan dukungan dua pendamping lapangan. Struktur multi-lapis ini mencerminkan komitmen untuk membangun koordinasi lintas sektor, namun sekaligus menjadi potensi sumber fragmentasi apabila mekanisme koordinasinya tidak berjalan optimal.

Analisis Implementasi Berdasarkan Model Edwards III

*Corresponding author
E-mail addresses: fadilahandayani22@gmail.com



1. Komunikasi

Variabel komunikasi dalam implementasi SITASKIN di Desa Cangkring menunjukkan kondisi yang relatif baik namun belum sepenuhnya optimal. Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Desa Cangkring, sosialisasi program telah dilaksanakan melalui beberapa mekanisme, yakni musyawarah desa, pertemuan RT/RW, dan kunjungan rumah oleh pendamping lapangan. Informasi mengenai kriteria penerima manfaat, jenis bantuan, dan prosedur pengaduan telah disampaikan kepada masyarakat meskipun dengan kualitas yang bervariasi di setiap saluran komunikasi.

Namun demikian, penelitian ini mengidentifikasi adanya distorsi komunikasi pada level tertentu. Pendamping lapangan mengakui bahwa mereka tidak selalu menerima pembaruan informasi program secara tepat waktu dari Dinas Sosial Kabupaten. Kondisi ini menyebabkan ketidakkonsistenan pesan yang disampaikan kepada penerima manfaat. Sebagaimana diungkapkan oleh salah satu pendamping dalam wawancara: "Kadang warga sudah terlanjur mendapat informasi yang berbeda dari yang kami sampaikan, karena ada yang membaca pengumuman lewat media sosial desa tapi isinya tidak selalu akurat." Temuan ini sejalan dengan argumentasi Edwards III bahwa inkonsistensi komunikasi dapat melemahkan efektivitas implementasi bahkan ketika para pelaksana memiliki komitmen yang kuat.

Analisis terhadap variabel komunikasi ini menemukan relevansinya dengan studi Huda et al. (2023) yang juga mengidentifikasi persoalan serupa pada PKH di Kabupaten Bondowoso. Permasalahan komunikasi dalam program kemiskinan di perdesaan tampaknya bukan fenomena yang terisolasi, melainkan mencerminkan kelemahan sistemik dalam tata kelola komunikasi program sosial di tingkat lokal.

2. Sumber Daya

Ketersediaan sumber daya dalam implementasi SITASKIN di Desa Cangkring menampakkan ketimpangan yang signifikan antara kebutuhan dan ketersediaan. Dari sisi anggaran, program ini didukung oleh alokasi dana yang memadai dari APBD Kabupaten Jember dengan tambahan dana dari Dana Desa untuk komponen tertentu. Namun, persoalan utama terletak pada sumber daya manusia, khususnya jumlah dan kualitas pendamping lapangan.

Desa Cangkring hanya memiliki dua orang pendamping lapangan untuk melayani 247 KPM. Rasio pendamping dengan penerima manfaat yang mencapai 1:123,5 ini jauh melampaui standar ideal yang umumnya direkomendasikan dalam literatur program pemberdayaan, yakni 1:50 hingga 1:75 KPM per pendamping. Kondisi ini mengakibatkan pendamping tidak dapat melakukan pendampingan intensif kepada setiap KPM, terutama yang membutuhkan intervensi lebih kompleks seperti pendampingan usaha ekonomi produktif. Temuan ini bersesuaian dengan hasil penelitian Rahayu dan Kurniawan (2022) yang menegaskan bahwa keterbatasan SDM pendamping merupakan hambatan struktural dalam implementasi program kemiskinan di perdesaan Jawa Timur.

Di samping aspek kuantitas, kualitas pendamping juga menjadi perhatian. Observasi di lapangan menemukan bahwa pendamping memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang bervariasi, dengan sebagian belum pernah mengikuti pelatihan khusus mengenai metodologi

pemberdayaan masyarakat. Kondisi ini berimplikasi pada ketidakseragaman kualitas layanan pendampingan yang diterima oleh KPM.

3. Disposisi

Dimensi disposisi dalam penelitian ini mengungkap gambaran yang lebih menggembirakan dibandingkan dua variabel sebelumnya. Kepala Desa Cangkring dan perangkat desa menunjukkan komitmen yang tinggi terhadap Program SITASKIN, yang tercermin dari inisiatif mereka dalam mengadakan rapat koordinasi bulanan dengan para pendamping, menyediakan ruang kantor desa sebagai pos layanan SITASKIN, dan secara aktif memonitor kemajuan implementasi melalui kunjungan lapangan.

Sikap positif kepala desa terhadap program ini tidak terlepas dari keyakinannya bahwa SITASKIN merupakan instrumen yang lebih efektif dibandingkan program-program sebelumnya yang bersifat parsial. Kepala Desa menyatakan dalam wawancara: "Dulu bantuan-bantuan itu datang sendiri-sendiri, tidak ada yang mengurus agar saling mendukung. Sekarang dengan SITASKIN kita bisa melihat keluarga mana yang sudah dapat apa, mana yang belum." Pernyataan ini mencerminkan pemahaman yang tepat tentang filosofi sinergi yang menjadi basis program.

Disposisi positif ini sejalan dengan temuan Mulyadi dan Setiawan (2021) yang menemukan bahwa kepemimpinan desa yang transformasional menjadi katalis penting dalam keberhasilan program pemberdayaan masyarakat. Komitmen kepala desa terbukti mampu mengkompensasi sebagian dari keterbatasan sumber daya yang ada dan menciptakan atmosfer implementasi yang kondusif.

4. Struktur Birokrasi

Variabel struktur birokrasi dalam implementasi SITASKIN menjadi aspek yang paling kompleks dan mengandung tantangan terbesar. Di satu sisi, program ini telah dilengkapi dengan SOP yang cukup rinci yang mengatur mekanisme verifikasi penerima manfaat, jadwal distribusi bantuan, prosedur pelaporan, dan mekanisme pengaduan. Keberadaan SOP ini memberikan panduan yang jelas bagi para pelaksana di lapangan.

Di sisi lain, koordinasi antar-lembaga dalam struktur multi-layer SITASKIN masih menghadapi sejumlah hambatan. Penelitian ini menemukan adanya keterlambatan distribusi bantuan pada triwulan ketiga tahun 2024 yang disebabkan oleh ketidakselarasan prosedur administrasi antara Dinas Sosial Kabupaten dengan sistem administrasi keuangan desa. Perbedaan jadwal pelaporan dan format dokumen yang tidak terstandarisasi antara kedua level pemerintahan mengakibatkan bottleneck dalam proses pencairan dana.

Temuan ini selaras dengan yang diidentifikasi oleh Abidin dan Fauzi (2023) mengenai fragmentasi birokrasi sebagai sumber inefisiensi dalam program kemiskinan.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Berdasarkan analisis terhadap keempat variabel Edwards III, penelitian ini mengidentifikasi beberapa faktor dominan yang mempengaruhi implementasi SITASKIN di Desa Cangkring. Faktor pendukung utama adalah: (1) kepemimpinan desa yang transformasional dan responsif, (2) ketersediaan data penerima manfaat yang relatif akurat melalui integrasi DTKS, (3) dukungan anggaran yang memadai dari APBD Kabupaten, dan (4) antusiasme masyarakat yang tinggi terhadap program.

*Corresponding author
E-mail addresses: fadilahandayani22@gmail.com



Adapun faktor penghambat yang teridentifikasi mencakup: (1) keterbatasan kapasitas dan jumlah pendamping lapangan, (2) inkonsistensi komunikasi antar-level pemerintahan, (3) fragmentasi prosedur administrasi antara kabupaten dan desa, dan (4) keterbatasan infrastruktur digital yang menghambat pelaporan real-time. Konfigurasi faktor-faktor ini membentuk pola implementasi yang Edwards III kategorikan sebagai implementasi parsial (partial implementation), di mana sebagian tujuan program tercapai namun masih belum optimal secara keseluruhan.

Dampak Program terhadap Masyarakat

Meskipun implementasi SITASKIN masih menghadapi berbagai hambatan, program ini telah menunjukkan dampak yang terukur terhadap kesejahteraan penerima manfaat di Desa Cangkring. Data laporan program menunjukkan bahwa 73% KPM melaporkan peningkatan akses terhadap layanan kesehatan, 68% mengalami perbaikan kondisi tempat tinggal, dan 42% KPM yang mengikuti program usaha ekonomi produktif melaporkan peningkatan pendapatan rata-rata sebesar Rp. 350.000 per bulan.

Dampak yang paling signifikan terasa pada dimensi akses layanan dasar, khususnya kesehatan dan pendidikan, yang mencerminkan keberhasilan aspek integrasi program. Sementara dampak pada dimensi ekonomi melalui program usaha produktif masih relatif terbatas dan memerlukan penguatan pendampingan yang lebih intensif. Temuan ini berkorelasi dengan penelitian Fitriani dan Susanto (2023) yang menemukan bahwa program terpadu menghasilkan dampak lebih signifikan pada akses layanan dasar dibandingkan aspek ekonomi produktif, terutama pada fase implementasi awal.

Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan SITASKIN di Desa Cangkring juga menunjukkan tren positif. Observasi pada kegiatan musyawarah desa tentang program ini mencatat tingkat kehadiran yang tinggi dari warga, termasuk kelompok-kelompok yang sebelumnya jarang terlibat dalam proses musyawarah desa, seperti kaum perempuan kepala keluarga. Fenomena ini mendukung argumen Lestari dan Prabowo (2021) bahwa program kemiskinan yang dirancang secara partisipatif mampu mendorong inklusivitas dalam tata kelola desa.

5. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa implementasi Program SITASKIN di Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah, Kabupaten Jember secara umum berjalan dalam kondisi yang cukup baik, namun belum sepenuhnya optimal. Dari perspektif model implementasi Edwards III, variabel disposisi menunjukkan kondisi paling positif yang ditandai oleh komitmen kuat aparatur desa terhadap program. Variabel komunikasi dan sumber daya menghadirkan tantangan yang cukup berarti, terutama terkait inkonsistensi penyampaian informasi dan keterbatasan kapasitas pendamping lapangan. Sementara itu, variabel struktur birokrasi menyajikan gambaran yang paradoksal: di satu sisi SOP telah tersedia dan cukup komprehensif, namun di sisi lain fragmentasi prosedural antara level kabupaten dan desa menjadi sumber inefisiensi yang belum terselesaikan.

Temuan-temuan ini memiliki implikasi teoritis dan praktis yang penting. Secara teoritis, penelitian ini memperkuat relevansi model Edwards III dalam menjelaskan dinamika implementasi kebijakan di level desa dalam konteks program kemiskinan Indonesia kontemporer. Pendekatan

sinergi yang diusung SITASKIN juga terbukti relevan sebagai inovasi kebijakan lokal yang mampu merespons keterbatasan program nasional yang bersifat sektoral. Secara praktis, penelitian ini merekomendasikan tiga langkah strategis: pertama, peningkatan rasio pendamping dengan menambah jumlah tenaga pendamping dan membangun kapasitas mereka melalui pelatihan terstruktur; kedua, standardisasi mekanisme koordinasi dan format pelaporan lintas level untuk meminimalkan fragmentasi birokrasi; dan ketiga, penguatan sistem komunikasi digital yang terintegrasi untuk memastikan konsistensi informasi dari kabupaten hingga ke penerima manfaat.

Penelitian ini memiliki keterbatasan pada cakupan satu desa yang mungkin tidak sepenuhnya representatif untuk generalisasi. Penelitian lanjutan disarankan untuk melakukan studi komparatif implementasi SITASKIN di beberapa desa dengan karakteristik berbeda, serta mengkaji dimensi keberlanjutan program dalam jangka panjang melalui desain penelitian longitudinal.

DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik, "Profil Kemiskinan di Indonesia Maret 2023," BPS Indonesia, Jakarta, 2023.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Sekretariat Negara, Jakarta, 2014.

A. Widodo dan B. Santoso, "Kegagalan Program Top-Down dan Keberhasilan Pendekatan Berbasis Komunitas dalam Pengentasan Kemiskinan Perdesaan," Jurnal Kebijakan Publik, vol. 12, no. 2, hlm. 145-162, 2021.

R. Pratiwi, D. Kurniawan, dan H. Setiawan, "Fragmentasi Kelembagaan sebagai Hambatan Implementasi Program Kemiskinan di Desa: Bukti dari Jawa Timur," Jurnal Administrasi Publik, vol. 9, no. 1, hlm. 78-95, 2022.

M. Hidayat dan N. Rahmawati, "Kajian Literatur Sistematik: Implementasi Program Pengentasan Kemiskinan di Indonesia 2015-2023," Jurnal Ilmu Pemerintahan, vol. 8, no. 3, hlm. 201-220, 2023.

G. C. Edwards III, Implementing Public Policy. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press, 1980.

J. Ife dan F. Tesoriero, Community Development: Community-based Alternatives in an Age of Globalisation, 4th ed. Sydney: Pearson Australia, 2016.

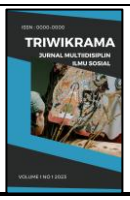
N. Huda, S. Wulandari, dan A. Prasetyo, "Analisis Implementasi Program Keluarga Harapan di Kabupaten Bondowoso: Perspektif Edwards III," Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan Publik, vol. 5, no. 2, hlm. 112-130, 2023.

I. Rahayu dan D. Kurniawan, "Kapasitas Pendamping dan Efektivitas Program Pemberdayaan Ekonomi Berbasis Komunitas di Jawa Timur," Jurnal Pemberdayaan Masyarakat, vol. 7, no. 1, hlm. 55-74, 2022.

B. Mulyadi dan R. Setiawan, "Kepemimpinan Transformasional Kepala Desa dan Keberhasilan Program Pemberdayaan Masyarakat: Studi di Jawa Timur," Jurnal Pemerintahan Daerah, vol. 10, no. 3, hlm. 189-208, 2021.

S. Abidin dan M. Fauzi, "Fragmentasi Birokrasi dan Inefisiensi Program Kemiskinan: Analisis Kelembagaan di Kabupaten Jember," Jurnal Administrasi Negara, vol. 11, no. 1, hlm. 44-62, 2023.

*Corresponding author
E-mail addresses: fadilahandayani22@gmail.com



H. Nugroho, P. Santoso, L. Dewi, dan K. Wibowo, "Pendekatan Sinergi Lintas Sektor versus Program Sektoral dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Komparatif di Empat Kabupaten Jawa Timur," Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, vol. 14, no. 2, hlm. 156-178, 2022.

D. Fitriani dan A. Susanto, "Dampak Program Bantuan Sosial Terpadu terhadap Kesejahteraan Keluarga Miskin Perdesaan di Kabupaten Jember," Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, vol. 6, no. 1, hlm. 33-51, 2023.

B. Wahyudi, "Kapasitas Administrasi Pemerintah Desa dan Akuntabilitas Implementasi Program Sosial: Pembelajaran dari Jawa Timur," Jurnal Tata Pemerintahan, vol. 9, no. 2, hlm. 98-117, 2022.

E. Lestari dan Y. Prabowo, "Partisipasi Autentik versus Mobilisasi Formal: Pembelajaran dari Program Pengentasan Kemiskinan Perdesaan di Jawa," Jurnal Pengembangan Masyarakat, vol. 5, no. 3, hlm. 211-230, 2021.

J. W. Creswell dan C. N. Poth, Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches, 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2018.

M. B. Miles, A. M. Huberman, dan J. Saldaña, Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook, 3rd ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications, 2014.

Peraturan Bupati Jember Nomor 47 Tahun 2022 tentang Percepatan Pengentasan Kemiskinan Terpadu. Pemerintah Kabupaten Jember, 2022.

K. Subarsono, Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2021.

Y. Winarno, Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS, 2023.